

**Pencapaian SDGs di Indonesia di Bidang
Pemberdayaan Perempuan**

Siti Hajar

**Hubungan Indonesia-Singapura dalam
Keseimbangan yang Mutual**

Yunesti Handayani

**Metode Penentuan Prioritas Produk Unggulan
Pertanian dan Industri Suatu Wilayah**
Agus Santoso dan Pariyo Pariyaman

**Budaya Memberi Dalam Bantuan
Luar Negeri Jepang**

Caturingtyas Pangestuti



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA**

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya
Drs. Erwin Zein, M.Si.

Mitra Bestari:

H. Amir Santoso, Drs. M.Soc.Sc., PhD, Prof.
Hj. Siti Hajar, Dra., MS, Ph.D

Pemimpin Umum/Dewan Redaksi:

Subarno, Drs., Magister

Dewan Redaksi:

Denny Ramdhany, Drs., M.Si.

H. Saiful Syam, Drs., M.A

Ambarwati, Dra., M.Si.

Luky Angelina, S.Sos

Sekretariat:

Supriyati, AMd.

Bendahara:

Suhartati

Distributor:

Kusyoto

Alamat Redaksi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Redaksi mengundang anda untuk mengirimkan karya ilmiah yang asli, belum pernah dipublikasikan, diketik dengan huruf Time Roman font 12, spasi tunggal, 8-12 halaman kuarto. Untuk hasil penelitian mencakup: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Untuk kajian teoritik/pemikiran meliputi: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Penulisan dokumentasi/kutipan bisa menggunakan model MLA, APA, atau Tradisional. Penulis wajib menyertakan biodata ringkas dan isi tulisan menjadi tanggung jawab individual penulis serta tidak harus mencerminkan opini dewan redaksi.

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	
PENCAPAIAN SDGs DI INDONESIA DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
Siti Hajar	
HUBUNGAN INDONESIA SINGAPURA DALAM KESEIMBANGAN YANG MUTUAL	
Yunesti Handayani	
METODE PENENTUAN PRIORITAS PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DAN INDUSTRI SUATU WILAYAH	
Agus Santoso dan Pariyo Pariyaman	
BUDAYA MEMBERI DALAM BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG	
Caturingtyas Pangestuti	



Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta 13210 Telp.(021) 4700903

PENCAPAIAN SDGs DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Siti Hajar, MS, Ph.D

Abstracts:

The purpose of the paper is to explain the importance of women empowerment programme in SDGs. This study conducted in Indonesia. This study is library research.

This paper tries to explain the importance of political education for women to accelerate achievement of quota of 30 percent women participation in legislative in SDGs programme, gender equality.

Keywords:

women empowerment, SDGs programme

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan pentingnya program pemberdayaan perempuan dalam pencapaian SDGs. Penelitian dilakukan di Indonesia. Sedang metode yang digunakan adalah studi telaah pustaka.

Tulisan ini menjelaskan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan, untuk mengakselerasi quota 30 persen perempuan di legislatif guna meningkatkan partisipasi politik perempuan di dalam pencapaian SDGs, dan persamaan gender.

Kata Kunci:

Pemberdayaan perempuan, program SDGs

I. PENDAHULUAN

Program SDGs adalah merupakan lanjutan dari program sebelumnya yaitu MDGs. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lengkap tentang SDGs, maka perlu terlebih dahulu kami bahas tentang MDGs. MDGs yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2000, berbarengan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium PBB, seperti kita ketahui merupakan kristalisasi dari hasil-hasil KTT sebelumnya, seperti KTT Sosial di Kopenhagen, yang diikuti 189 negara anggota PBB, yang mayoritas diwakili Kepala Pemerintahan.

Pada KTT tersebut, seluruh anggota telah sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium, deklarasi yang didasarkan pada pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan *Millenium* atau *Millenium Development Goals (MDGs)*.

MDGs yang kita ketahui telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB tersebut adalah tujuan pembangunan. Setiap tujuan memiliki satu atau lebih target yang telah disepakati semua anggota. Tujuan yang ingin dicapai di dalam MDGs saling terkait satu sama lain, sangat beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain: pengurangan angka kemiskinan dan kelaparan; penuntasan pendidikan dasar; mempromosikan kesetaraan gender; mengurangi kematian ibu dan anak; mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya; upaya pelestarian lingkungan hidup; serta membentuk kemitraan dengan para pihak di dalam melaksanakan program pembangunan.

Selanjutnya, target yang ingin dicapai melalui program-program MDGs antara lain: percepatan penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi negara-negara anggota, terlebih negara-negara miskin. Target yang ingin dicapai pada tahun 2015 melalui program MDGs antara lain: (1)

peningkatan kapasitas pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk pengumpulan data, analisis data serta monitoring pencapaian MDGs; (2) mendorong kapasitas pemerintah dalam menyusun MDGs dan pembangunan manusia; (3) mendorong kerjasama atau kemitraan dengan para pihak untuk sosialisasi dan advokasi; (4) memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pencapaian MDGs.

Selanjutnya, tujuan MDGs sebagaimana telah disebut di atas, dapat dicapai melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) negara anggota sepakat pada 2015 menargetkan untuk mengurangi angka kemiskinan, penduduk yang berpenghasilan USD 1/hari berkurang separuh, penduduk bebas dari penyakit, lingkungan yang baik, serta proporsi penduduk yang memperoleh air bersih semakin meningkat; (2) jaminan penduduk laki-laki dan perempuan dapat memperoleh pendidikan (dasar) dan memiliki akses pada semua level pendidikan; (3) mengurangi angka kematian ibu dan anak; serta (4) mengurangi penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Memberikan bantuan khusus kepada anak yatim piatu penderita HIV/AIDS; (5) penanggulangan pemukiman kumuh minimal 100 juta pada tahun 2020, dan penduduk dapat memperoleh pekerjaan yang layak; (6) mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan, dan mendorong dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan; (7) menjamin kelestarian lingkungan hidup; serta (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, penghapusan kemiskinan di sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil; dan menjamin kemaslahatan teknologi baru, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk semua entitas dan semua level di dalam masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan MDGs, pemerintah Indonesia kemudian melakukan kerjasama dengan *United Nations Development*

Programme (UNDP), Economic Social Commission Asia and Pasific (ESCAP), dan Asian Development Bank (ADB), LSM, dan organisasi masyarakat lainnya. Pada pelaksanaan Deklarasi Millenium, para pemimpin dunia telah menetapkan tekad untuk melakukan sejumlah tindakan di bidang lingkungan, antara lain: (1)menjamin diberlakukannya Protokol Kyoto, sehingga pada tahun 2020 emisi gas rumah kaca dapat dikurangi; (2) melakukan tekanan agar konvensi larangan penggundulan hutan/daratan, khususnya di Afrika; (3) menghentikan eksploitasi sumber-sumber air secara berlebihan dan membuat strategi pengelolaan air pada tingkat lokal, regional, dan nasional; (4) mengintensifkan kerjasama untuk mengurangi jumlah dan dampak bencana alam akibat tindakan manusia; serta (5) menjamin akses informasi.

Secara umum program-program MDGs sudah diterima dalam sistem PBB dengan memasukkan kerangka *Bretton Woods Institution (BWIs)* sebagai kerangka untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan, serta sekaligus untuk menilai kemajuan program tersebut. Kerangka BWIs diperlukan, karena dari delapan program MDGs, tujuh programnya berorientasi pada tujuan, sehingga diperlukan indikator-indikator untuk pencapaiannya; sedang program terakhir adalah cara atau sarana untuk mencapai program, seperti membangun kemitraan dengan para pihak.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa program-program MDGs memang bersifat saling terkait sebagaimana disebut di atas; serta mengikat negara-negara anggota PBB untuk melakukan pengurangan, antara lain pengurangan terhadap kemiskinan, ketimpangan gender, degradasi lingkungan, buta huruf di bidang pendidikan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan program penyediaan air bersih.

Secara umum, ada empat arti penting MDGs sebagai solusi mengatasi masalah-masalah dunia, antara lain: (1) MDGs adalah pakta global, yang di

dalamnya terdapat pengakuan dan tekad para pemimpin dunia untuk mencari solusi atas akutnya kemiskinan dunia, dan kesenjangan sosial ekonomi di negara-negara Utara. Di samping itu, MDGs juga dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan atas kekeliruan policy global, dan sekaligus koreksi atas policy tersebut; (2) MDGs telah menciptakan peluang yang langka untuk penguatan dan perluasan diplomasi ekonomi dan sosial bagi negara-negara miskin dan negara berkembang. Bersama dengan penguatan peranan pembangunan dan ekonomi PBB, peluang ini dapat secara signifikan diwujudkan menjadi hasil pembangunan di negara-negara Selatan; (3) MDGs dapat dijadikan pendorong terciptanya momentum international dan sekaligus nasional untuk pemerintah membuat pasar kerja bagi masyarakat miskin dan pembangunan manusianya. Di samping itu, perlu memperhatikan aspek pemerataan, kualitas hidup dan status sosial ekonomi kelompok marginal, bukan hanya terbatas pada penciptaan pasar yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi, investasi modal jangka pendek, dan menciptakan kebebasan; dan (4) MDGs pada tahap ini berhasil mendorong adanya konsensus dan terjalannya kemitraan antara negara-negara Utara dan negara-negara Selatan, untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan dan kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara miskin secara lebih massif dan lebih proaktif. Setidaknya, MDGs telah berhasil menetapkan jenis-jenis kebijakan makro-struktural seperti akses pasar dan utang, untuk diubah dan direformasi, agar rintangan-rintangan struktural yang dialami negara-negara miskin bisa diminimalisir.

II. EVALUASI PROGRAM MDGs

Secara keseluruhan program-program MDGs memang sudah cukup bagus dan komprehensif, mencakup penanganan masalah-masalah mendasar manusia, khususnya masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi negara

miskin
program
ditetapk
indikator
tidak te
kemiskin
ketersed
karenany
dengan
yang tela
T
yaitu pre
penguran
mengata
persen p
sangi b
pemilu
mengaks
keterwal
meningk
perlu dil
E
masyara
pembela
politik b
yang ba
participa
gender y

miskin dan berkembang. Untuk mengetahui pencapaian target dan tujuan program MDGs pada tahun 2015, maka program-program yang telah ditetapkan tersebut kemudian dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator yang telah dibuat. Hasilnya, hampir keseluruhan 8 program MDGs tidak tercapai tujuannya, baik di bidang pemerataan gender, penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar, lingkungan yang sehat, ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan air bersih, dan sebagainya. Oleh karenanya, kemudian dibuat kesepakatan lanjutan yang kemudian kita kenal dengan program SDGs untuk mengakselerasi percepatan program-program yang telah disepakati.

Tulisan ini akan lebih fokus membahas salah satu program SDGs yaitu program pengurangan pembrantasan diskriminasi terhadap perempuan, pengurangan ketimpangan gender, dan upaya pemerataannya. Untuk mengatasi ketimpangan gender, diberlakukan untuk kedua kalinya quota 30 persen perempuan di legislatif yang sudah direvisi, dengan memasukkan sanksi bagi partai politik yang tidak mengakomodasi quota tersebut pada pemilu 2014. Quota 30 persen perempuan dimaksudkan untuk mengakselerasi pengurangan gap atau ketimpangan gender, meningkatkan keterwakilan dan partisipasi politik perempuan di legislatif. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan mengurangi ketimpangan gender, perlu dilakukan pendidikan politik bagi warga bangsa, khususnya perempuan.

Pada setiap kontestasi politik seperti pemilu, idealnya di dalam masyarakat terjadi proses transformasi pendidikan politik, melalui pembelajaran politik, sehingga terjadi proses pemahaman dan penyadaran politik bagi warga bangsa. Dengan pemahaman politik dan kesadaran politik yang baik, maka semua warga bangsa termasuk perempuan akan lebih partisipatif membangun bangsanya, termasuk pembangunan pemerataan gender yang telah ditargetkan di dalam SDGs. Dengan kata lain, peningkatan

partisipasi perempuan dan pemerataan gender program SDGs dapat dicapai dengan terbangunnya pemahaman dan kesadaran terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan dan pembangunan. Salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan politik yang baik.

Selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan politik untuk warga bangsa, khususnya untuk perempuan. Secara umum, pendidikan politik dapat diklasifikasikan berdasar masa atau periode waktu. Pada fase pertama, fase awal kemerdekaan (1945-1950) pendidikan politik di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pada era revolusi atau era Orde Lama. Pada fase ini, pendidikan politik lebih difokuskan pada upaya menumbuhkan sikap patriotisme, yang menekankan *nation and character building*, dan bagaimana menjawab tantangan yang timbul bagi warga bangsa.

Selanjutnya, Pendidikan politik pada fase kedua, lebih difokuskan pada pemahaman dan kesadaran politik, untuk mengisi pembangunan setelah merdeka. Dengan pemahaman dan kesadaran politik, maka semua warga bangsa dapat mengisi pembangunan di segala aspek, termasuk pembangunan sumberdaya perempuan yang telah disepakati dan dicanangkan di dalam program SDGs.

Namun, di dalam perjalanan waktu, pendidikan politik pada fase ini ternyata cenderung diselewengkan, yang lebih mengarah pada indoktrinasi, yang justru dilakukan oleh partai politik dan pemerintahan yang berkuasa. Pengangkatan presiden seumur hidup pada masa itu, menjadi salah satu bukti penyelewengan tersebut; sesungguhnya hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Pada fase pemerintahan selanjutnya, yaitu fase pemerintahan Orde Baru (1966-1998), pendidikan politik lebih difokuskan pada upaya penyadaran berpolitik, menumbuhkan wawasan kebangsaan dan pemahaman

akan ker

dalam p

diselewe

memperk

member

K

kehidupa

politik l

kepentin

sikap ap

transaksi

seharusn

melahir

partisipa

III. PRO

U

diperluka

kepentin

ditangan

ambisius

faktor bu

kebuday

responsi

rekayasa

terwujud

U

pada set

akan kemajemukan, serta pentingnya integrasi bagi Indonesia. Sayang, di dalam perjalanan waktu, tujuan yang bagus tersebut kemudian juga diselewengkan oleh partai penguasa dan eksekutif, untuk pemenangan dan memperkokoh kekuasaan, seperti digiringnya rakyat ke bilik-bilik suara guna memberi dukungan pada partai tertentu.

Kemudian pada fase selanjutnya, fase reformasi, kegaduhan kehidupan berpolitik justru berkembang makin tidak terarah. Pendidikan politik lebih ditujukan untuk saling berkuasa, mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Akibatnya, proses politik tersebut justru menimbulkan sikap apatis di berbagai kelompok masyarakat, makin suburnya sistem transaksi di dalam proses politik. Padahal, idealnya pendidikan politik seharusnya bisa menjadi media transfer wacana politik publik, yang melahirkan partisipasi aktif warga bangsa untuk membangun, termasuk partisipasi politik perempuan di publik.

III. PROGRAM SDGs UNTUK KESETARAAN GENDER

Untuk mengakselerasi program kesetaraan gender memang diperlukan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh para pemangku kepentingan, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gender memang perlu ditangani dalam suatu roadmap yang lebih fokus dengan target yang jelas dan ambisius. Karena kesetaraan gender bukan hanya susah diperoleh karena faktor budaya patriarkhi yang sudah lama dan turun-temurun. Bahkan, pada kebudayaan masa kini pun banyak kita temukan kebudayaan yang tidak responsif gender. Untuk itu diperlukan program aksi yang lebih mengarah ke rekayasa budaya, agar target pencapaian kesetaraan gender makin mudah terwujud secara signifikan.

Untuk mencapai tujuan kesetaraan gender di dalam SDGs, maka perlu pada setiap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus dikawal untuk

memastikan apakah program-program yang dimaksudkan untuk kesetaraan gender sudah terakomodasi, sehingga tujuan kesetaraan gender dalam SDGs dapat dicapai.

Target SDGs untuk pemerataan gender dapat sekaligus digunakan untuk menurunkan kemiskinan, dan kelaparan, menurunkan angka kematian ibu, dan sekaligus untuk meningkatkan kesehatannya, serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Untuk itu, harus dipastikan dan dikawal untuk setiap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKDP) dan Pokja DPRD Kabupaten/Kota yang ramah gender. Terlebih di era industri 4.0 yang menuntut gerak cepat dan kelincahan para aktor.

IV. KESIMPULAN

Berdasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan dan target SDGs di bidang pemerataan gender, dapat dilakukan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di semua level. Pemerataan gender, dapat sekaligus digunakan untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan kesehatan, dan kualitas pendidikan. Untuk itu perlu Roadmap yang lebih fokus, dan strategi Pengarusutamaan Gender, serta program aksi yang mengarah ke rekayasa budaya (patriarkhi). Terlebih di era industry 4.0 diperlukan kelincahan para actor untuk mewujudkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. *Seks, Jender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press, 2014
- Anis, Qosim Ja'far, Muhammad. *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Bandung: Penerbit Zaman, 2016
- Calvert, Peter & Calvert, Susan. *Politics and Society in The Third World*, Second Edition, London: Pearson Education Limited, 2001
- Crompton, Rosemary and Michael mann, (ed.). *Gender and Stratification*. Cambridge: Polity Press, 1986
- Biro Pusat Statistik. *Data dan Informasi Kemiskinan*. Jakarta: Biro Pusat Statistik, 2010
- Dimbleby, Jonathan. *From Here to Sustainability*, The Real World Coalition, 2001
- United Development Programs, *Target Millenium Development Goals (MDGs)*, Laporan, 2016
- _____. *Berinvestasi dalam Pembangunan: Rencana Praktis untuk Mencapai Tujuan MDGs*, 2015
<https://journal.riksawan.com/index.php/IJGC/article/view/36>, 2018